



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN

*Wibawa Nugayah*

Jl. Imogiri No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55163 Telepon (0274) 410002, Fax. (0274) 410002  
E MAIL : [perhubungan@jogjakota.go.id](mailto:perhubungan@jogjakota.go.id) EMAIL INTERNET : [perhubungan@intra.jogjakota.go.id](mailto:perhubungan@intra.jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DAN TINDAKAN LANJUT BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN  
JULI TAHUN 2022

I. Latar Belakang

Dalam rangka membangun kerja sama yang harmonis dan meningkatkan kualitas dengan kelambagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (conflict of interest) diantara masing-masing pihak. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan dan/ pihak ketiga memiliki atau patut di diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan melalui penetapan peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut maka masing-masing Perangkat daerah/Unit Kerja mengidentifikasi benturan kepentingan di unit kerja masing-masing.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

III. Manfaat

Laporan penanganan benturan kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun pejabat/pegawai di Dinas Perhubungan dalam :

1. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
2. Menegakkan integritas;
3. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara.
4. Menciptakan lembaga yang bersih dan akuntabel.



IV. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

TABEL IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2022

No	SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN (sesuai Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta.)	PENJELASAN	LAPORAN
1.	Penyalahgunaan wewenang	Yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau memlampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.	NIHIL
2.	Perangkapan Jabatan	Yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.	3 orang
3.	Hubungan Afiliasi	Yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan npertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.	NIHIL
4.	Gratifikasi	Yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata sertafasilitas lainnya maupun sarana elektonik maupun non elektronik.	NIHIL
5.	Kelemahan Sistem Organisasi	Yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang menyebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.	NIHIL

TABUNG KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2022

No	Kategori	Nama
1	Kategori 1	Kategori 1
2	Kategori 2	Kategori 2
3	Kategori 3	Kategori 3
4	Kategori 4	Kategori 4
5	Kategori 5	Kategori 5

Berdasarkan tabel identifikasi atas penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 terdapat temuan mengenai perangkapan tugas sebagai berikut :

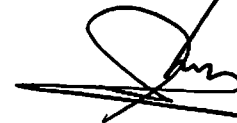
1. Pengelola Gaji di rangkap oleh Pengadministrasi Kepegawaian.
  - Untuk temuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
2. Pengadministrasi Perencanaan Program di rangkap oleh Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan.
  - Untuk temuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
3. Verifikator Keuangan di rangkap oleh Bendahara Penerima.
  - Untuk temuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

#### V. Penutup

Demikian laporan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2022 telah sesuai dilaksanakan, mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi acuan pada monitoring dan evaluasi yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

An Kepala  
Sekretaris



GOLKARI MADE YULIANTO, S.Sos, M.M  
NIP. 199719711199603 1 004 *d*